

BAB III

DINAMIKA KONFLIK INTERNAL ELIT POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MENJELANG PEMILU 2009

A. Kembali Konflik Internal PKB

Adalah sebuah keniscayaan bahwa dinamika suatu organisasi yang berwujud partai politik tidak akan pernah mampu lari dari kehadiran konflik internal maupun eksternal. Meskipun sebuah organisasi selalu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, namun dalam partai politik justru seringkali muncul kepentingan-kepentingan yang tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang tajam dan bahkan berseberangan. Agresi dari perbedaan ini mengalami internalisasi, dan diseminasi maka selanjutnya akan melahirkan sebuah konflik yang tajam dan dalam.

Partai politik menurut Mac Iver adalah suatu perkumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan (policy), yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD menjadi penentu cara melakukan pemerintahan. Pengertian lain mengenai partai politik menurut Sigmund Neumann adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar perjuangan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Dari perspektif teoritik yang menyajikan dua pengertian tentang partai politik diatas maka semakin meyakinkan kita bahwa dalam suatu partai politik memang rawan untuk terjadinya suatu konflik, banyak hal yang akan saling bergesekan baik mengenai ideology, nilai-nilai, prinsip, kelompok/golongan, faksi-faksi, dan lainnya yang ada dalam suatu partai.

Konflik yang terjadi pada suatu partai politik lebih banyak merupakan permasalahan internal. Seperti lazimnya dalam suatu organisasi, maka disitu berkumpul individu-individu yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan aturan yang mereka sepakati. Karena dalam suatu organisasi terdapat suatu struktur-struktur dengan hirarki tertentu, dan dengan hirarki itu maka terbentuk elit organisasi dan anggota biasa. Hubungan antar elit dan elit lainnya, elit dan anggota memungkinkan munculnya konflik juga.

Konflik dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali pecah. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dimakzulkan dari tampuk kepemimpinan partai melalui Rapat Pleno Dewan Syura dan Dewan Tanfidz pada Rabu 26 Maret 2008. Muhaimin diberondong berbagai tuduhan, di antaranya dianggap merancang muktamar luar biasa (MLB) untuk menggusur KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kursi ketua umum Dewan Syura PKB. Namun, berbagai tuduhan ini ditepis secara tegas oleh Muhaimin yang malah mensinyalir adanya infiltrasi anasir-anasir jahat dari dalam maupun luar partai

untuk menghancurkan PKB, memecah belah dirinya dengan Gus Dur, bahkan melakukan penghancuran politik NU.

Karena berbagai tuduhan tersebut tak pernah terbukti, mantan Ketua Umum PB PMII yang menjabat Wakil Ketua DPR itu pun menolak mengundurkan diri. Bahkan Muhaimin mengambil langkah maju dengan membentuk tim investigasi untuk membongkar konspirasi yang melengserkan dirinya. Namun, upayanya ini ditanggapi berbeda oleh elemen lain di tubuh PKB yang berbuntut pemecatan terhadap beberapa anggota tim investigasi dengan persetujuan Gus Dur, sang ketua umum Dewan Syura. Bahkan Gus Dur melakukan pembekuan terhadap beberapa DPW dan DPC yang dianggap mbalelo dan mendukung kepemimpinan Muhaimin yang dipilih secara demokratis dalam muktamar di Semarang.

Merasa dirinya masih sah sebagai ketua umum partai, tepat pada 6 April 2008 Muhaimin menggelar Musyawarah Pimpinan (Muspim) Dewan Tanfidz dan Dewan Syura PKB dan disusul beberapa hari kemudian dengan pemberlakuan Dekrit dan status darurat PKB yang menguatkan posisinya sekaligus menegaskan otoritasnya sebagai ketua umum partai yang sah. Konflik ini tampaknya belum akan usai, bahkan semakin meruncing saja layaknya pertikaian politik sebelumnya. Jauh sebelum malapetaka politik ini menerpa Muhaimin, konflik internal PKB telah pula menimpa Matori Abdul Djilil (alm) dan Alwi Shihab-

Syaifullah Yusuf yang akhirnya terpejal dari PKB. Konflik dalam tubuh partai yang dibidani oleh para ulama NU ini seolah terjadi tanpa henti.

Kasus pemakzulan paksa terhadap pimpinan partai tanpa melalui muktamar partai semacam ini adalah sesuatu yang sebenarnya amat ironis di dalam tubuh partai berlambang bola dunia dan sembilan bintang ini. Di satu sisi, PKB dipandang sebagai partai moderat yang mengusung pluralisme dan kemodernan Islam serta kekuatan pendorong demokratisasi dan konstitusionalisme di negeri ini. Di sisi lain, proses demokratisasi internal partai ini justru mengalami kemandekan- kalau bukan disebut kelumpuhan. Kita tentu ingat manakala Gus Dur diturunkan dari kursi Presiden RI oleh parlemen tanpa melalui prosedur konstitusional, bahkan oleh sebuah tuduhan korupsi yang akhirnya tak pernah terbukti.

PKB membela habis-habisan Gus Dur (terlepas dari Gus Dur berasal dari PKB). Sementara Gus Dur sendiri nekat mengeluarkan dekrit pembubaran DPR/MPR dengan dalih inkonstitusional. Namun anehnya, perlawanan substansial Gus Dur dan PKB demi tegaknya konstitusionalisme dan demokrasi beberapa waktu lalu itu justru tidak memiliki nilai intrinsik yang terbukti dengan gagalnya PKB membangun budaya demokrasi dan konstitusionalisme di dalam tubuh partai sendiri.

Dalam konteks ini, Gus Dur justru berwajah ganda. Dia berseberangan dengan komitmennya sendiri untuk menegakkan demokrasi dengan melakukan pemakzulan paksa terhadap ketua umum partai tanpa melalui prosedur konstitusional dan proses demokrasi. Dia bukan hanya melawan demokrasi, tetapi juga mem-bypass anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang sebenarnya menjadi basis pijakan dan ideologi partai.

Ironisnya lagi, berbagai tuduhan yang dialamatkan ke Muhaimin Iskandar selaku ketua umum partai justru belum pernah bisa dibuktikan secara konkret dan memadai. Dalam konteks sistem organisasi, gejala ini sepertinya semakin menegaskan bahwa pada dasarnya usaha untuk melakukan demokratisasi internal partai dalam tubuh PKB mengalami kegagalan. Sistem organisasi partai ini masih terkurung dalam karakter tradisional dan tergantung pada figur karismatik. Kedaulatan partai tidak terletak pada anggota, melainkan pada Ketua Dewan Syura yang memiliki wewenang nyaris absolut. Meski para kiai mengatakan PKB bukan Nahdlatul Ulama (NU), dalam kenyataannya struktur organisasi PKB sangat dipengaruhi sikap taklid dan sami'na waa atha'na (patuh dan mengikuti kata pemimpin). Inilah sesungguhnya sesuatu yang amat disesalkan dari partai politik yang lahir dari rahim NU ini.

Dalam konteks ini, PKB belum menerapkan pengertian demokrasi yang mengandaikan terjadinya persaingan kelompok kepentingan dari bawah ke atas,

tetapi telah berkembang menjadi apa yang pernah disebut Saiful Mujani sebagai “partai teater”-yang terpusat pada tokoh karismatis. Pada partai teater ini, tokoh utama PKB adalah Gus Dur, sedangkan pengurus lainnya, anggota, dan simpatisan dianggap penonton yang menikmati belaka. Sebagaimana Clifford Geertz (2000) yang menamai “negara teater” untuk sebuah negara yang bukan diatur oleh sebuah birokrasi hidrolik atau pemerintahan, melainkan sebuah pertunjukan yang diorganisasi dan dipakai untuk mendramatisasi obsesi kelas yang berkuasa atas budaya Bali: ketimpangan sosial dan kebanggaan; maka demikian pula sebuah “partai teater”.

Hakikat partai teater adalah tiadanya partisipasi dari bawah sehingga ia tidak sesuai dengan hakikat demokrasi modern yang membutuhkan partisipasi. Lebih jauh lagi model partai teater itu tidak kompatibel dengan perkembangan pemilih yang semakin rasional dan tidak lagi mendasarkan pilihan pada kesakralan.

Namun dari konflik itulah, kita menjadi mafhum bagaimana sosok dan kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid. Orang yang semula mati-matian membela atau punya keakraban khusus dengan Gus Dur, bisa jadi akan berbalik 180 derajat kondisi sebelumnya: dipecat atau diberhentikan (dimakzulkan). Itulah yang kemudian menimpa beberapa mantan elite PKB seperti Matori Abdul Jalil (alm.), Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf. Kini, dengan kasus yang agak serupa

namun dengan motif pemakzulan yang berbeda menimpa Cak Imin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Pemakzulan ini merupakan buntut atas kebekuan hubungan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syura dan Cak Imin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz yang telah sejak lama terpendam. Kebekuan hubungan ini terkait dengan 'permainan ganda' Cak Imin, seperti yang sering disebut Gus Dur. Sehingga *trust* Ketua Umum Dewan Syura PKB terhadap Ketua Umum Dewan Tanfidz hilang tak berbekas. Tidak heran jika Rapat Pleno melalui voting pada tanggal 26 Maret 2008 memutuskan Cak Imin mundur dari jabatannya. Dengan komposisi 20 suara menghendaki mundur dari 30 peserta rapat. Dari keputusan Rapat Pleno tersebut, jelas terlihat bagaimana forum menghendaki Cak Imin untuk mengundurkan diri. Bahkan, secara lisan Cak Imin telah bersedia menerima apa pun keputusan rapat.

Mengacu pada sandaran ART Partai, Pasal 22 ayat 1 ART PKB Bab Lowongan Antar Waktu menyebutkan bahwa Lowongan antar waktu Personalia Dewan Pengurus Partai terjadi karena *meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan*. Dari tiga alasan ini kita bisa sandarkan konteks legalitas pemakzulan Cak Imin. Untuk alasan pertama, jelas tidak mungkin. Tinggal dua dasar; mengundurkan diri atau diberhentikan.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, nyatanya mantan ketua umum PB PMII ini bersikukuh untuk tetap menjabat sebagai ketua Umum Dewan Tanfidz.

Dengan tetap *keukeuh*-nya Cak Imin menduduki kursi Ketua Umum, maka jelas telah terjadi pelanggaran. Dalam hal ini, beliau telah dianggap tidak mematuhi serta menghormati keputusan Rapat Pleno.

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konflik

1. Faktor Internal

Salah satu keputusan Mukernas PKB ialah jika PKB bukan partai pemenang pemilu, maka PKB tidak masuk dalam sistem pemerintahan. Keputusan tersebut yang menjadi landasan dan sikap politik PKB terhadap pemerintah. Namun, masuknya Erman Suparno dan Saefullah Yusuf dalam jajaran kabinet pemerintah merupakan pelanggaran terhadap keputusan yang telah disepakati sebelumnya yaitu keputusan dalam Mukernas, bahwa tidak ada kader partai yang masuk dalam jajaran kabinet. Disinilah yang menjadi awal mula konflik elit politik dalam internal PKB. Kemudian Saefullah Yusuf digantikan oleh Lukman Edi. Masuknya kader PKB dalam kabinet SBY dipandang oleh kubu GusDur sebagai bargaining politik antara Muhaimin dengan SBY. Hal inilah yang membuat konflik menjadi semakin tajam antara Muhaimin dengan GusDur. Sehingga pada waktu itu PKB mengambil sikap tegas dengan memberhentikan Lukman Edi dari posisinya sebagai Sekjend PKB. Pergantian posisi Sekjend diatur dalam AD/ART, partai tidak perlu mengadakan forum musyawarah nasional untuk memecat Lukman Edi dari posisinya.

Sedangkan Muhaimin diminta mengundurkan diri dari jabatannya, karena dianggap sudah menyalahi aturan-aturan partai. Namun Muhaimin tidak bergeming dan tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mundur dari posisi ketua Dewan Tanfidz PKB. Pada akhirnya Muhaimin diberhentikan dari posisinya sebagai ketua dalam rapat pleno pimpinan partai. Dalam rapat pengurus harian Gus Dur secara terang-terangan menyatakan sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan Muhaimin. Merespons pernyataan Gus Dur, lantas dilakukan pemungutan suara. Akhirnya, suara mayoritas dalam rapat itu menghendaki Muhaimin mundur dari jabatannya. Persoalan kian runcing ketika secara terang-terangan Muhaimin tidak mau mundur. Muhaimin menegaskan bahwa dirinya tetap sebagai ketua umum yang sah. Alasannya, dia dipilih melalui muktamar. Karena itu, jika harus dicopot, juga harus lewat muktamar.

Di pihak lain, kubu yang setuju dengan Gus Dur juga mengklaim bahwa Muhaimin sudah tidak lagi berhak menyandang jabatan ketua umum dewan tanfidziyah. Karena itu, dipilihlah Ali Masykur Musa sebagai pelaksana tugas ketua tanfidziyah hingga dilakukan Muktamar luar biasa (MLB).

Karena itu, masing-masing kubu menggelar MLB. Kubu pro-Gus Dur menggelar MLB pada 30 April-1Mei di Pesantren Al Ashriyyah, Parung, Bogor. Hasilnya, Gus Dur tetap menjadi ketua umum dewan syura dan Ali Masykur Musa terpilih aklamasi menjadi ketua umum dewan tanfidziyah.

Sehari kemudian, hingga 4 Mei, giliran kubu Muhaimin menggelar MLB di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Hasil dari MLB tersebut, Muhaimin tetap terpilih dengan aklamasi sebagai ketua umum dewan tanfidziyah. Sedangkan, untuk jabatan ketua umum dewan syura menggantikan Gus Dur, terpilih KH Aziz Mansyur dari Jombang. Dua kubu yang menggelar MLB itu sama-sama merasa paling sah. Sama-sama merasa didukung sejumlah DPW dan DPC PKB yang representatif. Dua kubu itu akan sama-sama mendaftarkan kepengurusan baru mereka ke Depkum HAM. Depkum HAM-lah yang akan menentukan apakah PKB versi MLB Parung atau PKB versi MLB Ancol yang diloloskan untuk ikut dalam Pemilu 2009.

Hal ini menambah panjang permasalahan serta menjadi rumit dan tidak sehat, karena aturan partai menyebutkan bahwa posisi ketua Dewan Tanfidz dengan Dewan Syuro hanya dapat diangkat dan diberhentikan dalam forum Muktamar yaitu forum pengambilan keputusan tertinggi dalam partai yang melibatkan seluruh elemen partai dari tingkat pusat sampai daerah.

Dengan adanya konflik elit tersebut, berdampak buruk pada kader partai yang berada ditingkat daerah dan terbagi menjadi dua kubu. Antara kubu pendukung GusDur dengan kubu pendukung Muhaimin. Kali ini GusDur mendapatkan perlawanan yang cukup proporsional, tepat dan konstitusional. Ketika Gus Dur menyingkirkan Matori dan Alwi Shihab, Gus Dur berada pada

posisi aman, yaitu tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Tetapi ketika memecat Muhaimin, justru Gus Dur yang terancam posisinya sebagai ketua Dewan Syuro DPP PKB. Dengan digelarnya Muktamar Luar Biasa di Ancol oleh kubu Muhaimin, maka kali ini Gus Dur yang harus pensiun, karena yang terdaftar sebagai pengurus yang sah di Depkumham adalah PKB kubu Muhaimin.

Penyebab konflik internal elit politik PKB berawal dari ada beberapa faktor yang menjadi dinamika dalam sebuah partai. Konflik yang terakhir antara Gus Dur dan putrinya Yenny Wahid versus Muhaimin Iskandar cs merupakan cermin konflik antara orang besar dan orang yang merasa besar, meski sumber masalahnya boleh jadi sangat sepele.¹

Lagipula dalam kenyataannya, Gusdur seperti sering dilansir media massa, hanya menginginkan transparansi kepada “sejumlah” politisi PKB mengenai penggunaan dana-dana partai. Konflik tersebut tak mungkin muncul secara sendirinya tanpa ada asap yang menjadi penyebabnya. Dalam pengertian lain, Gusdur tak mungkin melibatkan diri dalam suatu konflik jika keadaan di sekitarnya berjalan secara similar atau *adem ayem*. Gusdur menjadi begitu berang karena menganggap ada ketidakberesan yang terjadi di sekitarnya.

Konflik Gus Dur *versus* Muhaimin, sebagaimana diketahui, bermula dari rapat pleno gabungan antara DPP PKB dan Dewan Syuro, pada Rabu tengah

¹ www.gp-anshor.org

malam, 26 Maret 2008. Seakan di luar skenario setelah membicarakan berbagai hal, dalam rapat pleno itu lalu terlontar permintaan agar Muhaimin mengundurkan diri. Spekulasi yang bergulir di kalangan media massa menegaskan satu hal, bahwa Gus Dur sendiri yang melontarkan keniscayaan dalam rapat pleno itu agar Muhaimin mundur dari posisi Ketua Umum DPP PKB. Dua alasan yang dikemukakan bersangkut paut dengan negasi terhadap keberadaan Gus Dur di PKB. *Pertama*, Muhaimin dinilai ambisius untuk tampil sebagai calon wakil presiden dari PKB dalam Pilpres 2009. Padahal, Gus Dur telah menetapkan rencana untuk tampil sebagai kandidat presiden dalam Pemilu 2009. Logikanya, tak boleh ada calon wakil presiden dari PKB, mengingat PKB telah lebih dulu menetapkan Gus Dur sebagai calon presiden. *Kedua*, muncul rumor politik, bahwa Muhaimin tengah melakukan manuver untuk menggusur Gus Dur dari posisi Ketua Dewan Syuro PKB. Seperti kemudian terekspresikan ke dalam pemberitaan media massa, Muhaimin digambarkan telah datang ke banyak daerah untuk memperkukuh dukungan para kiai demi menggusur Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro.²

Dua hal inilah yang menjadi latar belakang paling penting munculnya tiga opsi dalam rapat pleno 26 Maret 2008, yaitu: (1) Muhaimin mundur dari posisi Ketua Umum DPP PKB, (2) Muhaimin dipecat sebagai Ketua Umum DPP PKB, dan (3) menyelenggarakan Mukhtar Luar Biasa (MLB) untuk mengganti

² warungpojokfilsafat.blogspot.com/2008/04/

Muhaimin. Voting tertutup yang melibatkan 30 orang peserta rapat pleno kemudian menghasilkan 20 suara mengharuskan Muhaimin mundur sebagai Ketua Umum DPP PKB, 8 suara menghendaki MLB dan 2 suara abstain. Dengan demikian, mayoritas peserta pada rapat pleno menghendaki Muhaimin *legowo* meninggalkan kursi Ketua Umum DPP PKB. Tentu saja, Muhaimin membantah semua tudingan itu. Celaknya, Gus Dur telanjur percaya pada informasi tentang rivalitas yang tengah dikobarkan Muhaimin Iskandar. Pernyataan pers Gus Dur yang terlontar pada pasca-rapat pleno 26 Maret 2008 justru merupakan penegasan secara repetitif agar Muhaimin benar-benar mundur dari posisi Ketua Umum DPP PKB. Kalau tidak, ia akan dimundurkan paksa. Realisme inilah yang kemudian memancing timbulnya berbagai komentar di seputar personalisasi PKB ke dalam diri seorang Gus Dur.

Konflik yang dipicu dengan pemecatan Muhaimin Iskandar, tampaknya semakin akut. Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan oleh kedua kubu secara terpisah pada waktu yang hampir bersamaan merupakan babak baru konflik di partai berlambang jagad itu. Konflik ini, dipastikan akan semakin menambah daftar panjang tentang sejarah konflik dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara di mata publik citra PKB, sebuah partai yang konon dibangun atas dasar paham moralis itu akan semakin melorot. Dalam sejarah kepartaian di Indonesia, terutama di era paskatumbangnya Orde Baru, nampaknya PKB menduduki rekor tertinggi dalam urusan pecat-memecat

(konflik) kader partai. Dari pemecatan ketua umum partai sampai pembekuan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC).

Fenomena perebutan surat udian nomor urut partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), antara Muhaimin Iskandar (ketua dewan Tanfidz versi MLB Ancol) dengan Yenny Wahid (Sekjen PKB versi MLB Parung), menjadi sesuatu yang menggelitik. Pasalnya perebutan itu kemudian menjadi tontonan masyarakat umum, melalui siaran di berbagai televisi. Bahkan sehari setelah itu, foto perebutan surat suara antara Muhaimin Iskandar dan Yenny, banyak menghiasi headline berbagai media cetak. Kondisi yang demikian, tentunya amat memprihatinkan banyak kalangan, termasuk konstituen PKB yang sebagian besar adalah warga Nahdlatul Ulama. Sebagaimana diketahui, konflik PKB kembali mencuat setelah terjadi pemecatan Muhaimin dari kursi Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB. Pemecatan yang kemudian meruncing menjadi perpecahan dua kubu PKB. Yakni PKB kubu Gus Dur yang kemudian melakukan MLB di Parung dengan Ketua Umum Dewan Tanfidz Ali Maskur Musa dan Yenny Wahid sebagai Sekjen. Sementara kubu Muhaimin Iskandar menyelenggarakan MLB di Ancol dan menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Lukman Edy sebagai Sekjen. Konflik terus bergulir, sembari menunggu putusan pengadilan.

Pada sisi lain, PN Jaksel sudah memutuskan bahwa pemecatan Muhaimin Iskandar dari Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Lukman Edy dari Sekertaris Jenderal Dewan Tanfidz dinyatakan tidak sah. Dengan kata lain, gugatan mereka berdua diterima oleh PN Jaksel. Tetapi PKB kubu Gus Dur kemudian mengajukan Kasasi ke MA atas putusan PN Jaksel. Pada sisi lain, gagasan islah juga sudah mulai mengemuka, sejalan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2009. Meskipun *islah* kemungkinan yang dianggap paling sulit oleh kedua kubu. Sementara itu sesuai undang-undang, konflik partai yang dibawa ke jalur hukum, diharuskan selesai selama 90 hari terhitung sejak kasus itu diproses

Gus Dur yang "dieksekusi" publik sebagai faktor determinan. Tetapi bagi pendukung Gus Dur, opini demikian tidak dapat dibenarkan, tapi akan menuduh keterlibatan pihak ketiga, pemerintah, misalnya. Terlepas dari berbagai spekulasi, sulit diingkari bahwa PKB tidak terlepas dari bayang-bayang Gus Dur selaku deklaratator. Bagi yang memahami nalar politik Gus Dur, dengan gampangnya berkilah, Gus Dur adalah tokoh yang memiliki telenta dan "terawang" politik sehingga langkahnya yang dinilai keliru hari ini dapat dibenarkan pada masa mendatang.

Namun, persoalan konflik PKB sekarang bukan lagi berwacana ihwal Gus Dur sebagai tokoh karismatik yang setiap langkahnya dibenarkan dan diterima

atau sebaliknya. Di luar itu, persoalan yang terpenting adalah menyelamatkan PKB dari keterpurukan citra dan perolehan suaranya pada Pemilu 2009.

Gus Dur akan tetap jadi faktor determinan yang mewarnai PKB sepanjang hayat. Historisitas Gus Dur dan PKB demikian emosional sehingga sulit ditarik bentangan demarkasi keduanya.

Determinasi Gus Dur dalam PKB dapat bernilai positif selama partai dijalankan di atas khitah, menyalurkan aspirasi politik kaum nahdliyin. Sebagai kaum mayoritas, jelas kaum nahdliyin menjadi "takaran" masyarakat miskin Indonesia yang sebagian besar petani dengan standar ekonomi relatif rendah. Akibat konflik internal PKB, yang merupakan partai berbasis NU, tidak dapat memenuhi harapan nahdliyin untuk perbaikan nasibnya.

Fragmentasi elite politik NU di tubuh PKB membuatnya abai terhadap kemaslahatan nahdliyin. Implikasinya, suara nahdliyin bisa eksodus ke partai lain akibat krisis kepercayaan pada elite politik NU di PKB.

Konflik antara dua kubu ini semakin mengerucut sejalan dengan sempitnya waktu yang ditetapkan KPU terkait dengan berbagai tahapan pemilu 2009, seperti pendaftaran ulang partai, pengambilan nomor urut partai dan sebentar lagi adalah kampanye partai politik.

Konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara kubu K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin Iskandar, yang juga keponakannya itu, mengundang perhatian sekaligus keprihatinan. Terlalu sulit bagi publik memahami logika politik Gus Dur yang memecat Muhaimin dari posisi ketua umum PKB saat partai berbintang sembilan ini seharusnya berkonsolidasi menghadapi Pemilu 2009.

Di saat partai-partai lain sudah start kampanye maraton Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih berkutut dengan konflik. Sebagai partai yang berbasis warga nahdliyyin, elite PKB saat ini benar-benar kehilangan selera humor. Tak ada lagi kehangatan pergaulan khas santri yang penuh guyon itu, semuanya serba legal formalistik, penyelesaian konflik tidak cukup lagi dengan pertemuan tahlilan atau manakiban, melainkan harus lewat pengadilan.³ Sulit membayangkan dan menebak apa yang diinginkan elite PKB dalam partai. Antara konsolidasi partai dengan memecat kader yang membelot memang bisa dicari benang merahnya. Namun, bila yang dilengserkan tidak terima dan merasa tak berbuat dosa sedikit pun, sudah bisa diduga, buntut konflik akan panjang.

Seandainya segenap kader PKB sadar historis mengapa partai itu didirikan dan prospek masa depannya yang cerah asal dikelola dengan baik, tentu konflik sebisa mungkin dihindarkan. Kenyataan demikian itu haruslah ditanam mendalam

³ Pikiran Rakyat On Line

di hati masing-masing kader. Program-program partai terasa kalah gaung oleh dinamika internal elite partai yang penuh konflik. Belum ditemukan formulasi penyelesaian baku yang ideal untuk dinamika negatif itu. Dari tahun ke tahun, selalu muncul konflik elite partai yang sangat merugikan PKB. Begitu seringnya PKB dihujani konflik internal.

Sejak dideklarasikan pada tahun 1998 oleh para kyai NU hingga sekarang, sepertinya PKB tak pernah lepas dari kemelut. Tragisnya, konflik itu harus berujung pada perpecahan dan pemecatan kader partai. Bahkan ironisnya, yang menjadi korban pemecatan justru ketua umum partai yang merupakan simbol partai.⁴

Para deklarator PKB yang terdiri dari para kyai dan ulama kharismatik tentunya tidak pernah berharap partai yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan warga NU itu ternyata dalam perjalanannya melenceng dari cita-cita awal. Alih-alih bekerja untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, yang terjadi justru gontok-gontokan untuk berebut kepentingan. Para elit PKB telah menyeret para kiai berpengaruh untuk masuk ke dalam pusaran konflik dan hal itu tak disadari para kiai yang sebenarnya tak terlalu politis itu.

Dinamika seperti itu di setiap partai selalu ada dan bukan dominasi di PKB saja. Perbedaannya, di partai-partai lain, konflik bisa diredam dan

⁴wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22454&Itemid=62

dilokalisasi atau mungkin malah berhasil diselesaikan secara baik-baik. Sebaliknya, di PKB, konflik dibiarkan berlanjut, tidak diredam, dan kalau perlu dibesar-besarkan untuk kemudian diselesaikan lewat forum tertinggi seperti muktamar, muswil, atau muscab yang luar biasa, hal tersebut diperparah oleh tradisi elite partai yang gemar ngerumpi di media massa.

Dari tiga kali kepengurusan PKB, selalu berakhir dengan perpecahan. Kubu Ketua Umum yang dilengserkan di tengah jalan melawan kubu Gus Dur. Fenomena terjadi sejak Ketua Umum PKB pertama, yang dijabat Matori Abdul Djilil, Ketua PKB kedua Alwi Shihab, dan kepengurusan PKB saat ini yang diketuai Muhaimin Iskandar. Berbagai alasan muncul sebagai penyebab konflik. Muaranya selalu satu, Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB merasa sudah tidak cocok dengan Ketua Umum Tanfidziah, bila sudah demikian, tinggal menunggu pemecatan yang bisa terjadi setiap saat.⁵

Perseteruan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melibatkan Muhaimin Iskandar dan KH Abdurrahman Wahid cenderung menjauh dari islah. Masing-masing kubu menggelar musyawarah luar biasa (MLB) dan mengklaim diri sebagai kubu yang sah dan legitimate. Pengamat menilai penyebab konflik PKB lebih kepada faktor manajemen dan pelembagaan partai politik (parpol) yang belum terwujud.

⁵ Okezone.com

Konflik yang terjadi selama ini merefleksikan adanya sesuatu hubungan yang tidak harmonis (disfungsi) dalam manajemen partai. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB, Dewan Syuro terutama pada tingkatan kepengurusan DPP berperan sangat dominan dan strategis sebagai lembaga tertinggi partai yang berwenang membuat kebijakan strategis partai. Ketidakharmisan hubungan antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz tampaknya hanya persoalan implementasi dari sebuah aturan partai yang semestinya dipahami oleh kedua pihak. Maka, diperlukan kesamaan persepsi tentang peran dan fungsi masing-masing lembaga. Kedua lembaga ini diharapkan dapat menjalankan tugas partai sesuai amanah yang ada dalam aturan-aturan partai. Keduanya perlu menjalin komunikasi dan saling terbuka.

Sebuah kewajaran bila sebuah partai politik kadang timbul intrik-intrik yang mengarah pada sebuah konflik. Semua karena kentalnya kepentingan yang menjadi dasar orientasi orang-orang di dalamnya. Persoalannya adalah tergantung dari para pengurus partai itu dalam hal mengelola sebuah konflik. Agar potensi konflik yang ada tidak menjadi semakin meluas, barangkali mungkin di sini pentingnya memahami management konflik.

2. Faktor Eksternal

Dinamika internal politik PKB memang cukup menarik. Awalnya, konflik PKB tidak sekadar konflik sesama warga Nahdliyin saja, namun juga faktor luar.

Sebut saja kepentingan elit politik yang berada di sekitar kekuasaan. Kasus pemecatan Mathori Abdul Djalil dan kasus pengusuran Alwi Shihab-Saifullah Yusuf oleh Gus Dur-Muhaimin terlihat jelas. Posisi selalu sama, orang-orang yang digusur Gus Dur berada di pemerintahan. Perpecahan dalam partai politik, termasuk dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sesungguhnya merupakan sesuatu yang lazim dalam dunia politik di Indonesia. Tapi kalau kita mau berburuk sangka, berbagai perpecahan politik dalam tubuh partai politik seperti itu, bisa jadi merupakan "by design" sebagai konsekuensi perebutan kekuasaan di tingkat nasional, untuk mengerdikan partai lawan politik.⁶ Carut-marutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bukan tanpa ada pihak ketiga yang mendesain. Karena memang banyak pihak yang tak menginginkan NU bersatu. Sebab kalau semua komponen kekuatan NU bersatu, akan menjadi kekuatan besar.

Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdurrahman Wahid, menyatakan ada intervensi pada konflik di dalam PKB. Namun, Gus Dur, begitu panggilan putra ulama ternama Wahid Hasyim, tak peduli dengan intervensi tersebut meskipun tahu yang mengintervensi. "Saya tahu ada yang intervensi, yang melakukan saya juga tahu. Tapi saya tidak peduli,"kata Gus Dur.⁷

⁶ *Klipingclipping's Blog.com*

⁷ Baca Tempo 03 Desember 2005

Kubu GusDur melihat bahwa konflik ini tidak semata-mata melawan kubu Muhaimin, tetapi juga melawan sebuah rezim kekuasaan. Hal itu terbukti dengan keberpihakan lembaga hukum dengan lembaga penyelenggara pemilu terhadap kubu Muhaimin. Yaitu KPU mengeluarkan surat edaran bahwa Muhaimin dan Lukman Edi sebagai pengurus yang sah. Padahal keputusan sampai ditingkat kasasi adalah pengurus PKB yang sah ialah merujuk kepada hasil Muktamar di Semarang. Yaitu Muhaimin sebagai ketua dan Zannuba Arifah Chafsoh, MPA sebagai Sekjend.

C. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Konflik Internal PKB

Sepanjang Jalan Kalibata 1, Jakarta Selatan, berjejer mobil pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Malam itu, Rabu pekan lalu, seluruh pimpinan pusat, wilayah dan cabang dari partai itu datang. Awalnya kedatangan pembesar partai bintang sembilan itu untuk menggelar prosesi perpisahan Mahfud MD, salah seorang pengurus yang diangkat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Mumpung sekalian ngumpul, panitia juga mengagendakan sebuah rapat internal usai acara perpisahan itu.

Kiat awalnya untuk sekadar konsolidasi pasca keluarnya Mahfud dari partai besutan Gus Dur. Tapi siapa sangka, hasil rapat itu berbuat putusan mengejutkan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tiba-tiba dicopot dalam rapat itu. Berita itu tentu membuat geger ranah politik, terutama di tubuh PKB.

Sebab selama ini Muhaimin dikenal sebagai anak emas Gus Dur sang pendiri partai. Dan sebelum-sebelumnya tidak ada gelagat soal pelengseran Muhaimin. Pelengseran Muhaimin tersebut diputuskan tengah malam, usai rapat pleno. Malam itu, Gus Dur yang ikut hadir buka suara. "Muhaimin sudah tidak loyal lagi kepada PKB," kata Gus Dur. Indikasi 'pemberontakan' Muhaimin terkait kongres Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di Batam, dua pekan lalu. Organisasi kemahasiswaan ini disebut-sebut sedang digalang Muhaimin dan beberapa kader yang lain untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB), dan melengserkan Gus Dur dari posisi Ketua Dewan Syuro.

Kalimat Gus Dur ini langsung direaksi para pengurus. Agenda rapat yang sejatinya hanya memberikan opsi digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB), atau tidak, jadi bertambah satu, yakni mendesak mundur Muhaimin. Akhirnya 30 anggota Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro yang hadir mengambil suara. Hasilnya, 20 orang menyetujui mendepak Muhaimin, 3 orang tidak setuju, 3 orang meminta MLB, dan 4 orang abstain. Esok harinya putusan pemberhentian dengan tidak hormat Muhaimin dari kursi ketua umum PKB menjadi geger. Kubu Muhaimin menganggap pencopotan Muhaimin tidak masuk akal dan cacat hukum. Tapi yang terjadi, muktamar yang jadi basis demokrasi partai tidak berjalan. Sebab suara Gus Dur menjadi dominan. Tidak bisa dipungkiri, atmosfer di PKB sangat mirip dengan pesantren yang pada umumnya sangat patuh pada keputusan sang kiai. Karena itu pula titah Gus Dur selalu menjadi acuan dalam setiap kebijakan

partai. Meskipun dalam beberapa kasus budaya pesantren yang diusung PKB tidak sepenuhnya berjalan. Misalnya perseteruan Gus Dur dengan kiai Abdulah Faqih dan kiai sepuh lainnya. Namun dalam kasus pelengseran Muhaimin, kubu Muhaimin menduga keputusan Gus Dur ini merupakan manuver lima sekawan PKB yang sekarang mengelilingi Gus Dur. Mereka adalah Yenny wahid, Muslim Abdurrahman, Ikhsan, Aris Djunaedi, dan Sigit Haryo Wibisono. "Otak skenario konflik ini Sigid Haryo Wibisono, mantan anggota Partai Golkar Jawa Tengah, yang kemudian gabung ke PKB. Ia adalah teman Yenny".⁸

Sigid atau yang bernama lengkap Raden Mas Tumenggung Sigid Haryo Wibisono, selama ini disebut-sebut sebagai salah satu sumber konflik di internal DPP PKB. Ketika digandeng PKB, Sigid sempat diributkan pengurus DPD Golkar Jawa Tengah. Pasalnya namanya masih tercatat di DPD tapi ia juga aktif di DPP PKB. Ia bahkan dibilang ngantor di DPP PKB tapi tak pernah lewat pintu utama alias lewat belakang. Begitu spesialnya Sigid di mata Gus Dur lantaran ia punya hubungan khusus dengan Yenny, Sekjen DPP sekaligus putri Gus Dur. Sedangkan para pengurus yang lain banyak yang tidak suka dengan kehadiran Sigid di partai itu.

Karena tidak disenangi sejumlah petinggi di PKB, Sigid mulai membuat skenario untuk melengserkan lawan-lawannya satu per satu. Yang jadi sasaran nomer satu adalah Muhaimin. Sumber lain menyebutkan, untuk melengser

⁸ Wawancara dengan Agus Wiryoto mantan Ketua Umum DPW PKB DIY

Muhaimin, Sigid memberikan rekaman yang berisi pembicaraan Muhaimin untuk menjatuhkan Gus Dur. Ahmad Niam dari DPP DKI mengatakan, tuduhan yang mengatakan Muhaimin menggalang massa itu tidak benar. Sebab Muhaimin adalah orang yang tidak pernah melawan Gus Dur. Justru mereka-mereka (kelompok lima sekawan) yang selalu bikin kisruh di partai. Muhaimin tidak akan mengundurkan diri dari jabatan ketua Umum, sebelum anasir-anasir jahat disekeliling Gusdur hilang.

Sejak Yenny berperan di PKB, sejumlah kebijakan mengejutkan diputuskan DPP PKB. Sebanyak 16 DPW PKB dan 60 DPC dibekukan. Kebijakan dramatis ini menandai babak baru konflik di partai tersebut. Pembekuan 16 DPW diduga karena tidak memberi setoran saat diminta oleh orang suruhan Yenny. Pemerasan terhadap DPW dan DPC susah sekali untuk dibuktikan. Namun keresahan ini semakin bising terdengar bahkan sampai ke telinga Gus Dur. Orang suruhan Yenny yang disebut suka minta setoran adalah Sigid Haryo Wibisono.

Contoh pembekuan yang terjadi ada di DPW Jatim, Jabar dan DPC Cirebon dan Lumajang. DPC Cirebon saat Muscab menetapkan Ayyub sebagai Ketua DPC. Karena sudah terpilih, ia kemudian mengajukan SK ke DPP dari hasil Muscab tersebut. Tapi bukan SK yang didapat Ayyub, melainkan surat pembekuan DPC dengan alasan korupsi. M Sukrilla, Sekjen DPC PKB Lumajang

juga punya pengalaman tidak mengenakan terhadap Sigid. Soalnya ia sempat dimintai uang oleh Sigid sebesar Rp 100 juta. Alasan Sigid waktu itu, uang tersebut sebagai panjer supaya DPC Lumajang tidak dibekukan. Wacana pembekuan DPC Lumajang itu sudah bergulir setahun lalu. Karena terancam dibekukan, Sukrila kemudian meminta bantuan kepada Sigid. Sebab ia menganggap Sigid orang dekatnya Yenny dan Gus Dur. Dengan melobi Sigid diharapkan bisa mengurungkan niat DPP membekukan DPC PKB Lumajang.

Pertemuan antara Sigid dan pengurus DPC Lumajang kemudian terjadi di Hotel Hyatt, Surabaya. Saat itu hadir KH Rofik Abidin Ketua Dewan Tanfidz DPC Lumajang dan Ustad Nurchotib, Wakil Ketua Dewan Tanfidz, Sekjen DPC Lumajang Sukrila, dan AM Romli. Di hotel tersebut Sigid menjanjikan tidak akan membekukan DPC Lumajang dengan cara melakukan maktour khusus terhadap Gus Dur, asal diberikan uang Rp 100 juta sebagai uang mukanya. Permintaan Sigid kemudian dituruti. Uang yang diminta itu kemudian diberikan kepada Sigid melalui Musyafa Rouf, Ketua DPC PKB Surabaya, yang baru pekan lalu kantornya juga dibekukan DPP PKB. Namun meski sudah setor uang, putusan pembekuan DPC Lumajang tetap terjadi. Sekalipun surat resmi pembekuan dari DPP PKB belum sampai.

Tanggal 22 maret 2008 DPC PKB Lumajang kemudian menggelar Munas Cabang Luar Biasa di Hotel Bromoviu, Probolinggo. Muscablub itu dianggap

Sukrila lucu. Sebab peserta tidak kredibel, misalnya 3 ketua dewan tanfidz yang sudah diberhentikan dan dicabut seluruh haknya ikut mengambil suara. Aroma uang dalam pembekuan kantor cabang juga dialami Dedi Wahidi dari DPC PKB Bojonegoro, dan Musa Zainudin dari DPW PKB Lampung.

Sedangkan pembekuan tanpa alasan diterima Imam Nachrowi yang ditunjuk sebagai karteker PKB Jatim. Sebelum terpilih pada forum Muswilub di pasuruan, 2005 lalu, ia adalah tokoh penting PKB Jatim pascapartai ini diterjang konflik internal. Politikus muda yang pernah memimpin PMII Jatim ini masuk dan memegang kendali PKB Jatim ketika partai ini dalam kondisi dilanda konflik internal berat.

Jatim adalah ranah politik paling penting dan strategis bagi PKB. Partai ini mendulang suara sebanyak 12.002.885 suara pada Pemilu 1999 dan 11.989.564 suara pada Pemilu 2004. Suara sebanyak itu adalah lebih dari 50% total suara PKB secara nasional. Dibekukannya kepengurusan PKB Jatim di bawah Imam Nachrowi terjadi pasca ditariknya Ketua DPW PKB Jateng Abdul Kadir Karding ke DPP PKB. Baik Imam Nachrowi maupun Abdul Kadir Karding adalah politikus muda berdarah NU, yang memiliki background aktivis Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Isu soal uang setoran dan pembuat kisruh di PKB memang sempat mendapat perhatian Gus Dur. Tapi sekalipun Gus Dur pernah mengecamnya, Sigid yang menjadi aktor kunci persoalan itu tetap aman di

DPP. Bahkan sejumlah DPW dan DPC yang tidak menuruti keinginan Sigid akhirnya dibekukan.

Tapi apa daya para tokoh muda PKB tidak bisa berbuat banyak. Sebab mereka sangat menghormati pendiri PKB tersebut. Dalam kasus pemecatan Muhaimin, Sigid juga dianggap paling berperan. Kubu Muhaimin menilai keputusan itu karena manuver Sigid yang merasa tidak senang dengan kebijakan Muhaimin sebelumnya. Sebab setelah Syaifullah Yusuf dicopot dari Menteri PDT, rupanya Sigid sangat berminat menggantikan Syaiful yang akrab di sapa Gus Ipul. Namun Ambisi Sigid kandas karena Muhaimin lebih menjagokan Lukman Edy menjadi menteri. Padahal Yenny sudah melobi ke sejumlah petinggi PKB untuk menggolkan Sigid. Pascapemilihan Lukman Edy, hubungan Yenny dan Muhaimin jadi renggang. Belakangan Lukman Edy dan Muhaimin dituding Gus Dur telah berjalan sendiri-sendiri alias bukan berdasarkan kebijakan DPP PKB.

D. Peran Kiai NU dalam Konflik Internal PKB

Berkiprah dalam dunia politik adalah salah satu dalam rangka memperhatikan masalah umat, berpolitik baik itu politik praktis atau politik “tinggi” dengan jangkauan masa depan yang jauh seperti kiprah didunia pendidikan, semuanya harus bermuara pada kemaslahatan ummat, yang secara

otomatis kemaslahatan seluruh rakyat tanpa membedakan ras, suku, agama, dan seterusnya.⁹

Inilah yang disebut *fiqh siyasah* (pemahaman politik). Ini juga yang mendasari kiai-kiai NU tidak bisa melepaskan diri dari politik. Meskipun demikian, ini tidak dikembangkan dari awal oleh NU. Menurut Mohammad Toha Anwar, dalam pandangan Islam antara urusan Negara dan urusan agama tidak dapat dipisahkan. Politik umat Islam bukannya mempolitisasi agama, tetapi berpolitik berdasarkan kaidah agama dan termasuk ibadah, berpolitik harus dilakukan dengan niat yang tulus dan dengan cara-cara yang suci.¹⁰

Seiring dengan dengan perubahan politik nasional dan kondisi pondok pesantren yang sepiantas ketinggalan dalam menanggapi perubahan zaman, maka para kiai dan tokoh-tokoh NU merasa perlu melaksanakan pendidikan politik bagi warga NU. Sehingga tidak ada kesan bahwa warga NU yang dididik di pondok pesantren tidak tahu masalah politik dan demokrasi.

Fiqh siyasah bertujuan bertujuan membuka khazanah keilmuan pesantren melalui wacana demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Didalamnya di diskusikan dan diperdebatkan, baik titik temu maupun titik tengkar, antara khazanah Islam yang hidup didalam pesantren, dan perkembangan keilmuan Islam yang hidup

⁹ Mohammad Toha Anwar, *Fikih Politik: Tinjauan Partai Islam*. Jakarta. Studia Press, 2000. Hlm 9

¹⁰ Ibid. hlm 10.

dalam masyarakat pada umumnya, diskursus demikratisasi dan penegakkan hak asasi manusia.

Dalam literature politik Islam maupun politik secara umum suda cukup banyak yang mengakaji tentang politik Islam, peranan kiai dalam politik, politik yang islami dan sebagainya, yang pasti kita akan disuguhi banyak variasi pendapat. Ada dua inti pendapat besar, yaitu: pertama; dunia politik praktis harus dijauhi karena identik dengan permainan yang kotor, licik, mencari-cari jabatan dan ini akan membawa pada kemadharatan, kedua; dunia politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peran seorang kiai untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Polemik pendapat yang demikian sangat wajar terjadi, yang paling penting adalah bagaimanakah pendapat-pendapat tersebut mampu menjadi dinamika yang positif dan terkendali.

Pengertian kiai pada umumnya adalah sosok seorang yang dianggap mempunyai kapasitas dalam ilmu agama Islam, lazimnya adalah seorang ustadz atau guru agama yang mengabdikan berjuang untuk mengembangkan ajaran Islam, umumnya adalah pengasuh madrasah berbagai tingkat, atau pengasuh pondok pesantren. Selain tiu seorang kiai juga bisa lahir dari factor keluarganya yang menjadi seorang kiai, sehingga otomatis beliau sebagai generasi penerus sebagai seorang kiai dan pengasuh pondok pesantren.

Peranan para kiai dalam politik praktis, mereka bergabung dengan partai politik sejak mulai lahirnya partai politik yang ada di Indonesia. Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan kiai adalah keturunan darah biru dari tokoh-tokoh atau pemimpin pada masanya, yang sudah sering terlibat dalam percaturan politik bangsa Indonesia sejak era revolusi hingga sekarang, setidaknya dapat ditelaah atau diamati gerakan kulturalnya.¹¹

Keberadaan seorang kiai pada komunitasnya adalah lebih banyak mengisi ruang kosong sebagai implementasi pola-pola kepemimpinan yang paternalistik, dimana hubungan antara pemimpin dan masyarakatnya menganut pola patron-klien. Dengan pola hubungan yang demikian maka seorang kiai akan menjadi figure sentral, panutan panutan, tokoh yang berpengaruh dikomunitasnya. Peranan strategis kiai dalam politik sebagai seorang patron, maka kiai akan mempunyai banyak keuntungan "sosial" atas masyarakatnya. Kiai akan mampu mempengaruhi, memobilisasi, mengarahkan dengan baik terhadap masyarakatnya, disisi lain masyarakat sebagai klien patuh pada pemimpinnya yaitu seorang kiai nyaris tak bersyarat.

Kebanyakan kiai dijawab beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai kerajaan kecil dimana kiai sumber mutlak kekuatan dan kesewenangan (power of authority) dalam kehidupan dilingkungan pesantren. Tidak seorang pun atau orang lain dalam lingkungan pesantren yang dapat

¹¹ Kang Young Soon. *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan NU*. Jakarta. UI Press. 2007. Hlm. 185

melawan kekuasaan kiai, kecuali kiai lain yang lebih besar pengaruhnya. Para santri selalu mengharapkan dan berfikir bahwa kiai yang dianutnya merupakan orang yang percaya penuh kepada dirinya sendiri, baik dalam soal pengetahuan Islam, maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren. Akan tetapi, pengaruh kiai kini tidak lagi sebatas lingkungan pesantren, masyarakat umum pun memiliki rasa hormat dan menempatkan kiai sebagai seorang yang menempati status sosial yang lebih tinggi.

Dukungan dari konstituen dalam dunia politik praktis adalah segala-galanya, sehingga siapa yang kuat ditingkat basis, maka akan mudah menjadi tokoh politik yang kuat. Dalam kehidupan politik, para kiai selalu aktif baik dalam melontarkan gagasan-gagasan maupun dalam memobilisasi massa.

Akan tetapi setelah memasuki masa orde baru, gerakan para kiai dan elite-elite politik NU sangat dibatasi. Pemerintah orde baru mengetahui betul potensi ummat Islam, khususnya potensi NU yang berbasis pada pesantren-pesantren dan ini sangat mengkhawatirkan jika tidak membatasi ormas NU untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, pada masa orde baru gerakan para kiai dibatasi dengan tujuan agar para kiai tidak menjadi kekuatan politik yang besar, dan juga agar komunitas para kiai hancur dapat digerakkan untuk kepentingan kelanggengan kekuasaan.

Karena posisi yang demikian strategis, maka akan sangat menarik untuk menjadikan kiai sebagai penarik dukungan suara masyarakat (vote getter). Hal ini yang menjadi pangkal awal terjadinya konflik pada para kiai karena mau tidak mau para kiai yang aspirasinya berbeda akan saling bergesekan di level bawah. Dari fenomena yang banyak kita saksikan sekarang, memang ada suatu resiko yang harus ditanggung apabila seorang kiai terjun langsung dalam dunia politik praktis. Ketika seorang kiai terjun dalam politik praktis, maka akan timbul konflik laten pada seluruh penghuni pondok pesantren, para alumni, bahkan sampai pada keluarga para santrinya.

Belum lagi, apabila terjadi dalam sebuah pondok pesantren yang diasuh beberapa kiai, dan diantara para kiai tersebut ada yang berbeda dalam memilih partai politiknya. Maka akan persoalannya akan semakin runyam, konflik internal pondok sudah pasti terjadi. Masing-masing kiai tentunya akan memanfaatkan posisinya sebagai sosok yang dijadikan patron, dihormati, disegani, untuk mampu menarik konstituen dari partai yang diperjuangkannya. Fenomena ini sangat jelas bisa dilihat ketika menjelang pemilu, pilkada, atau menjelang pergantian kepemimpinan sebuah partai politik.

Posisi kiai yang semula diharapkan mampu menjadi mediator aspirasi dari bawah, maka akan banyak mengalami bias ketika posisi yang diambil adalah sebagai kelompok kepentingan yang tentunya menjadi anggota fungsionaris partai

politik tertentu. Konflik antar kiai menjadi sering terjadi karena mereka saling bertarung untuk sebuah kepentingan pragmatis, memenangkan sebuah kepentingan kelompok.

Sering pula kita dapatkan fenomena konflik pada level antar kiai juga dipicu ketika posisi atau jabatan yang didapatkan oleh para kiai tersebut tidak memuaskan, sehingga proses fragmentasi akan terjadi, akhirnya para kiai tersebut mencoba beraktualisasi diri, mereka beradu kuat dukungan massa. Bila ada yang tidak terakomodasi kepentingannya pada partai politik, maka dengan ikhtiar khas kiai bisa meloncat ke partai lain dan menunjukkan 'kesaktiannya' bahwa pengaruhnya juga besar.

Para kiai yang telah terjun dan mendarah daging didunia politik sudah diposisikan oleh masyarakat sebagai representasi kepentingan kelompok, sehingga apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka ucapkan merupakan kepentingan sesaat kelompok tertentu.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Kacung Maridjan MA, berpendapat kunci konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada di tangan para kiai atau ulama. "Kuncinya terletak pada kiai, apakah para kiai itu membuka diri atau merasa menang sendiri."¹²

¹² www.nu.or.id

Munculnya konflik politik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak semata merepresentasikan konflik kepentingan politik di tubuh partai politik yang secara resmi diklaim berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU) ini. Konflik tersebut sekaligus mengindikasikan kegagalan NU sebagai organisasi sosial keagamaan. NU tidak hanya menjadi korban, ataupun dikorbankan, demi ambisi politik tokoh-tokohnya sendiri. Sebagaimana kekhawatiran sebagian tokoh NU sejak awal, keberadaan partai politik berbasis NU bukannya menjadi pendorong, dinamika peran NU sebagai organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan sosial dan keagamaan, apalagi sebagai wahana meningkatkan prakarsanya untuk menyejahterakan umat *Nahdliyin*, melainkan sebaliknya.

Konflik internal di tubuh partai yang berbasis massa nahdliyin itu mengundang banyak keprihatinan. Karena, pertama; konflik PKB secara tidak langsung berdampak kepada dinamika organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU). Hal itu berbeda dari konflik internal dalam partai-partai lain yang murni konflik kepentingan elite partai. Kedua, sangat memprihatinkan mengingat sosok Muhaimin sebagai politikus muda NU yang saat ini sedang menanjak karirnya. Terlebih dalam konteks wacana kepemimpinan kaum muda yang sedang hangat saat ini.

Setiap kali terjadi konflik di PKB, dipastikan menjadi keprihatinan NU. Tetapi NU tampak gamang, apakah harus turun tangan mendamaikan kedua kubu

yang sedang bertikai atau bersikap netral. Ada dorongan dari banyak pihak supaya secara struktural NU ikut campur memikirkan jalan keluar agar konflik tidak berlarut-larut.

Tawaran sejumlah pimpinan PBNU yang ingin memfasilitasi konflik rupanya tidak mendapat tanggapan yang memadai dari kedua kubu. Ada kesan, kedua kubu di PKB ingin menempatkan secara proporsional, bahwa konflik PKB bukan konflik NU, dan diselesaikan secara internal partai. Selain itu, sejak muktamar di Solo NU memantapkan diri memegang khittah 1926, yaitu mengembalikan NU sebagai organisasi keagamaan dan menjaga jarak dengan parpol.

Secara historis keterlibatan NU struktural sebenarnya bisa dibenarkan. Sejak semula telah ditegaskan bahwa PKB adalah partai yang secara resmi didirikan oleh NU. Ibarat ayam dan telur, NU adalah induknya dan PKB telurnya. Sementara itu para kiai berharap PKB merupakan alat perjuangan politik NU. Sudah seharusnya penyelesaian masalah-masalah besar di PKB juga difasilitasi oleh PBNU dan para kiai.

Hanya saja PBNU belum menemukan mekanisme untuk menyatukan polarisasi politik PKB yang tidak merugikan salah satu pihak. Polarisasi yang terjadi sekarang menunjukkan sama-sama mendapat dukungan kultural dari warga NU. Dari konteks itulah, NU mulai menghadapi persoalan dilematis. Di satu sisi, langkah-langkah yang diambil oleh PBNU belakangan ini sebenarnya ingin

menunjukkan bahwa NU tidak identik dengan PKB karena ada juga partai lain berbasis nahdliyin; di sisi lain tetap saja bila konflik ditubuh PKB terus berlanjut akan berdampak negatif bagi perkembangan NU.

Barang kali itulah, risiko yang harus diterima oleh organisasi Islam yang bersinggungan dengan politik praktis. Konflik partai yang dilahirkan akan berimbas kepada dinamika ormas induknya. PKB berulah, NU kena getah.

Konflik di tubuh PKB benar-benar menjadi evidensi empirik bahwa dengan PKB-nya yang gemuk, nasib kiai NU hanya mampu menjadi alat politik bagi segelintir orang yang sebenarnya sama sekali sudah kehilangan *ghirah* (semangat) ke-NU-annya. Siapa pun yang berebut kursi pimpinan atau pengurus NU, pantas diragukan bahwa mereka memang peduli dengan nasib NU dan jamaahnya. Mereka bahkan lebih pantas dicurigai sebagai segelintir oportunis yang memimpikan jabatan politik dengan memanfaatkan status syuriah, tanfidziyah atau bahkan sekedar segelintir orang yang berusaha melegitimasi statusnya sebagai tokoh NU.

Sebagai bukti, suara politik internal NU tidak pernah solid, bukan hanya internal kepengurusan partai politik (PKB), melainkan juga internal NU sendiri. Pencalonan gubernur dan bupati di berbagai daerah, terutama yang berbasis NU memperlihatkan bahwa mereka yang dikenal sebagai tokoh-tokoh NU sebenarnya sama sekali bukan orang yang peduli pada NU, bahkan PKB sendiri. Mereka

lebih merepresentasikan dirinya sebagai tokoh-tokoh yang sangat potensial memanfaatkan atau memang sengaja menyediakan diri untuk dimanfaatkan siapa pun demi sebuah jabatan politik.

Hal ini tampaknya tidak lepas dari pergeseran budaya politik nasional yang tidak diikuti budaya organisasi NU. Atmosfir politik sudah sama sekali berubah dari sebelumnya, NU tidak lagi dihadapkan pada konflik ideologis dan politik dengan penguasa. NU bahkan memperoleh kesempatan untuk mengakses kekuasaan jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Oportunisme politik yang pada masa sebelumnya dapat diklaim atau memang benar-benar bermakna strategis dipertahankan, bahkan berkembang menjadi oportunisme yang sungguh oportunistik.

Bila memang ditujukan demi kemaslahatan NU, kekalahan demi kekalahan calon kepala daerah yang didukung PKB di daerah-daerah pemilihan berbasis PKB pada dasarnya juga merepresentasikan rona terburuk dari wajah oportunistik yang dimainkan politisi NU. Kekalahan calon-calon kepala daerah dari kalangan NU di daerah pemilihan berbasis NU bukan karena NU tidak memiliki calon-calon kepala daerah yang memiliki kapabilitas dan dukungan rakyat, melainkan karena mereka yang ada di tubuh PKB sendiri pada dasarnya tidak peduli calon yang diusung menang atau tidak.

Selain bagi tokoh NU dan atau PKB, tidak ada satu pun di antara oportuniste tersebut yang dapat menunjukkan nilai strategis atau mashlahah bagi NU, apalagi umatnya. Oportuniste yang berkembang bahkan telah meracuni NU sendiri. Sejak NU memiliki kendaraan politik PKB, secara signifikan tidak ada peningkatan kualitas khidmatnya pada umat, bahkan pada NU sendiri. Setelah hampir satu dasawarsa NU melalui PKB-nya dapat mencetak banyak pejabat dan orang kaya baru (OKB), lembaga pendidikan dan sosial NU tetap merana seperti masa-masa sebelumnya. Selain konsolidasi politik, kagiatan jam'iyah-jam'iyah diniyah yang sebelumnya menjadi simbol dinamika NU di daerah juga semakin merosot, bahkan banyak daerah yang belum memiliki kantor NU yang representatif.

Budaya ketergantungan pada tokoh-tokoh agama (ulama, kiai) sebagaimana berlaku di masa lalu tampaknya sudah benar-benar usai. Tidak ada satu pun tokoh NU yang benar-benar dapat dijadikan panutan, bahkan sekedar simbul kesatuan umatnya. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sendiri yang sebelumnya sempat menjadi tokoh fenomenal yang dibanggakan kaum Nahdliyin tampaknya sudah menjadi bagian dari kaum neo-oportunis NU. Gus Dur tidak lagi menampakkan kapasitasnya sebagai pengayom dan panutan bagi semua, karena dia sendiri telah menjadi bagian dari konflik politik PKB dan internal NU. Gus Dur saat ini adalah bagian dari berbagai masalah mendasar NU yang perlu segera diselesaikan.

E. Solusi dan Langkah PKB Dalam Menghadapi Pemilu 2009

Didalam pertempuran politik, seperti didalam semua pertempuran-pertempuran yang kompleks, setiap orang berlaku sesuai dengan rencana yang dipahami lebih dulu, kurang lebih rencana yang sudah terolah dimana setiap orang membuat antisipasi bukan saja dalam serangan-serangannya akan tetapi juga tentang jawaban-jawaban lawannya dan alat-alat untuk menyelesaikannya.¹³ Rencana perjuangan ini merupakan strategi. Sebuah bentuk strategi politik yang khusus adalah strategi pemilihan umum. Yang diutamakan disini adalah memperoleh kekuasaan dan sebanyak mungkin pengaruh dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, sehingga politik dapat diwujudkan dan suatu perubahan dalam masyarakat dapat tercapai.¹⁴

Prasyarat sebuah perencanaan taktik adalah adanya perencanaan strategi.¹⁵ Perencanaan taktik dan pengambilan tindakan hanya dapat memiliki arti apabila sebuah strategi direncanakan secara teliti. Jadi perencanaan taktik dapat memberikan jawaban atas pertanyaan siapa akan melakukan apa, kapan, diaman, bagaimana, dan mengapa. Keputusan taktis semacam ini digunakan untuk mencapai setiap tujuan strategis.

¹³ Maurice Duverger. *Sosiologi Politik*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2007. Hlm. 283

¹⁴ Peter Schoder, *Strategi Politik*, Friedrich Naumann Stiftung, Jakarta, 2004, hlm 9

¹⁵ Ibid, hlm 10

Yang menjadi permasalahan bagi Partai Kebangkitan bangsa ialah kondisi internal partai yang tidak solid. Oleh Karena itu butuh perencanaan taktis agar perolehan suara tidak menurun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 2004. Namun, Ketua Umum Tanfidz DPP PKB, Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR RI yakin suara PKB akan utuh bahkan bertambah dalam pemilu 2009. Keyakinan tersebut menurutnya didasari oleh sikap tokoh NU yang mayoritas ulama yang masih setia mendukung PKB.

Langkah taktis yang diambil ialah PKB terus berupaya merapatkan barisannya dengan PBNU, baik itu ditingkat pusat sampai ditingkat cabang. Dan atas dasar itu PKB akan mengalami peningkatan suara, khususnya warga Nahdliyin yang menjadi basis utama PKB.

Dalam masyarakat demokratis, pemilu yang demokratis dalam berbagai bentuk dan kemungkinannya dilaksanakan sebelum seseorang dapat mengambil alih kekuasaan dan mendapat kemungkinan untuk memiliki pengaruh. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana pihak tersebut memperoleh bagian suara yang cukup dalam pasar pemilu agar dapat memiliki pengaruh atas pihak eksekutif berdasarkan konstitusi.¹⁶

Sementara itu, untuk menghadapi pemilu legislatif, Lukman Edy mengatakan PKB menggunakan tim sukses sebagai alat kemenangan pemilu.

¹⁶ Ibid, hlm 9

Langkah itu dilakukan karena PKB gagal melakukan konsolidasi dalam dua tahun terakhir akibat konflik internal. "Kalau dahulu, kami 100 persen mengandalkan infrastruktur partai. Tetapi kini, kami gunakan tim sukses sebagai alat pemenangan pemilu. Hampir dua tahun PKB tidak mampu melakukan konsolidasi karena konflik. Banyak waktu dan energi yang terbuang,"¹⁷

Menurut Muhaimin, PKB sudah berada di wilayah dan jalur strategi yang tepat. Yaitu dengan menempatkan kiai ataupun tokoh lokal yang notabene mayoritas adalah tokoh NU, karena mekanisme pemilu kali ini menggunakan mekanisme perolehan suara terbanyak yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, ketokohan lokal didalam suatu lingkungan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam penarik dukungan suara masyarakat. Dengan begitu, kondisi internal PKB dapat terkonsolidasikan agar mendapatkan posisi tawar terhadap pemerintahan.

Dalam menghadapi pemilu presiden, Partai Kebangkitan Bangsa menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2009 bertempat di hotel Sahid Raya. Forum Muspimnas sudah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB, H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. untuk menjadi Cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya itu, Ketua Umum DPP PKB juga diberi mandat untuk mengambil langkah-langkah politik yang diperlukan dan memastikan partisipasi optimal PKB dalam Pilpres

¹⁷ Lampung Post, edisi 17 Oktober 2008